PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama :LailatulQodariah
NIM : 22 2012 246

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : LailatulQodariah
NIM : 222012246

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	**: Lailatul Qodariah**
NIM	**: 222012246**
Program Studi	**:Akuntansi**

Menyatakan bahwa skripsi in telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 10-02 **2017**

METERAI TEMPEL
TGL 20
87EB1AEF351147292
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lailatul Qodariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang**
Nama	**: Lailatul Qodariah**
NIM	**: 222012246**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal 24-3-2017.

Pembimbing,

Welly, SE,M.SI
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, SE, M.Si., Ak,.CA
Nidn/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- **Kesusksusesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.**
- **Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama**

(Lailatul qodariah)

Dengan cinta dan doa

Kupersembahkan Skripsi ini Khusus

Kepada:

- **Bapakku (M. Ali) dan Ibuku (Musringah)**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil a'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang". Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kompherensif pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kinerja pegawai yang bekerja di Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, diketahui bahwa pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran berbasisi kierja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang sedangkan Transparansi Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

Ucapkan terimaksih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Ibuku tercinta Musringah dan Ayahku tercinta Muhammad Ali atas doa, kasih sayang yang berlimpah. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Welly S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang diberikan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Drs. Fauzi Ridwan SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajudin, SE, M.Si, AK, CA, dan Bapak Mizan. SE., AK, M.Si selaku ketua program Studi Akuntansi dan Wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhaamdiyah Palembang.
4. Ibu Welly S.E., M.Si selaku pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan serta memberikan saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepala Dinas dan Pegawai di Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang yang telah membantu.
7. Kepada seluruh keluarga saya yang telah memberikan doa serta dukungan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan (Citra Dewi SE, Siska Yulianti SE, Vidia Lucia SE, Loli Anesia, Fitriyanti dan Sari Anggraini) serta sahabat sepermainan (Rumantika dan Anggini) yang telah memberikan doa dan dukungan serta semangat yang tak pernah lelah.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyususnan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.....

Wassalamua'laikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, 2017

Penulis

Lailatul Qodariah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENESAHAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMANPRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI ix

HALAMAN DAFTAR TABEL xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiv

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....10

B. Landasan Teori.....12

1.Akuntabilitas.....12

a. Pengertian Akuntabilitas.....12

b. Fungsi dan Jenis Akuntabilitas.....16

c. Jenis Akuntabilitas.....16

2. Transparansi.....17

a. Pengertian Transparansi.....17

b.Karakteristik Transparansi.....18

3.Kinerja.....19

a.Pengertian Kinerja.....19

b. Syarat-syarat Kinerja.....21

c. Faktor-faktor Mempengaruhi Kinerja.....22

C. Hipotesis.....23

BAB III Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian.....24

B. Lokasi Penelitian.....25

C. Operasionalisasi Variabel.....25

D. Populasi dan Sampel.....26

E. Data yang Diperlukan.....26

F. Metode Pengumpulan Data.....27

G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 39

1. Sejarah Singkat Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.....39

2. Visi dan Misi Dinas Keberssihan dan Keindahan Kota Palembang.....39

3. Struktur Organisasi..... 40

4. Pembagian Tugas dan Fungsi..... 42

B. Pembahasan Hasil Penelitian..... 48

1. Karakteristik Variabel.....48

2. Karakteristik Responden.....50

3. Pembahasan.....53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan..... 85

B. Saran.....85

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.I Hasil Penelitian Awal..... 5

Tabel II.I Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitia Sekarang..... 12

Tabel III.I Operasionalisasi Variabel..... 25

Tabel III.II Populasi dan sampel 26

Tabel IV.2 Hasil Total Jawaban Responden..... 50

Tabel IV.3 Karakteristik Responden Bedasarkan Usia..... 51

Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 51

Tabel IV.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 52

Tabel IV.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 52

Tabel IV.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 53

Tabel IV.8 Rekapitulasi jawaban kuesioner indikator akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran 54

Tabel IV.9 Rekapitulasi jawaban kuesioner indikator akuntabilitas Proses 55

Tabel IV.10 Rekapitulasi jawaban respomden indikator akuntabilitas Program 56

Tabel IV.11 Rekapitulasi jawaban kuesioner indikator akuntabilitas Kebijakan 58

Tabel IV.12 Rekapitulasi jawaban kuesioner indikator informatif .. 59

Tabel IV.13 Rekapitulasi jawaban kuesioner keterbukaan 60

Tabel IV.14 Rekapitulasi jawaban kuesioner pengungkapan 61

Tabel IV.15 Rekapitulasi jawaban kuesioner masukan 62

Tabel IV.16 Rekapitulasi jawaban kuesioner keluaran 64

Tabel IV.17 Rekapitulasi jawaban kuesioner hasil 65

Tabel IV.18 Rekapitulasi jawaban kuesiner manfaat 66

Tabel IV.19 Rekapitulasi jawaban kuesioner dampak 67

Tabel IV.20 Hasil Uji Validitas variabel akuntabilitas..... 70

Tabel IV.21 Hasil Uji Validitas variabel transparansi 71

Tabel IV.22 Hasil Uji Validitas variabel kinerja 71

Tabel IV.23 Hasil Uji Reliabel 72

Tabel IV.25 Hasil Uji Autokorelasi 74

Tabel IV.26 Hasil Uji Multikolinieritas 75

Tabel IV.28 Hasil Uji Hipotesis secara simultan 77

Tabel IV.29 Hasil Uji t 79

Tabel IV.30 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 82

Halaman Gambar

		Halaman
Gambar IV.1	Struktur Organisasi	40
Gambar IV. 24	p-p plot dependent variabel Y	73
Gambar IV. 27	scatterplot dependent variabel Y	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Format Kuesioner
Lampiran II	Foto Copy Surat Riset
Lampiran III	Foto Copy Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran IV	Foto Copy Sertifikat Lulus Toefl
Lampiran V	Foto Copy Sertifikat KKN UMP
Lampiran VI	Jadwal Kegiatan Peneliian
Lampiran VII	Foto copy Serrtifikat Membaca dan Hapalan Al-Qu'ran
Lampiran VIII	Biodata Penulis

ABSTRAK

Lailatul qodariah/222012246/Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Knerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Aggaran Berbasisi Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif hasil penelitian ini menunjukan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang dan secara parsial Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dan Transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja

Abstract

Lailatul Qodariah / 222012246 / Influence of accountability and transparency of performance-based budgeting to the performance of the Department of Hygiene and beauty Palembang / Public Sector Accountin

The problems of this study was how the influence Accountability and Budget Transparency base on performance against the performance of the Department of Hygiene and beauty of Palembang ?. The purpose of this study was to determine the effect of accountability and transparency of performance-based budgeting to the performance of the department cleanliness and beauty of the city of Palembang.

This type of research is associative research data used are primary and secondary data, data collection techniques by using interviews, questionnaires and documentation. methods of analysis, quantitative methods the results of this study indicate that the accountability and transparency of performance-based budgeting influence simultaneously on the performance of the department cleanliness and beauty of the city of Palembang and partially accountability significantly affect performance and transparency is not partial effect on the performance of the department cleanliness and beauty of the city of Palembang ,

key words: accountability, transparency, performance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ekonomi disetiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Salah satu prinsip strategi yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menciptakan prinsip tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian keuangan yang berlaku. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan *(Openess)* pemerintah aktivitas pengelolaan sumberdaya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi,sosial, dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan. Informasi keuangan di gunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang diangarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga Pilar yang dimaksud adalah transparansi, partisipasi dan akuntanbilitas. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah upaya-upaya untuk mewujudkan *good governance* telah mulai digulirkan melalui instrumen peraturan perundangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Menurut Mardiasmo (2009: 20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajian, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintahan serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintahan diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah diharapkan berimplikasi

pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah indonesia baik tingkat pusat maupun daerah. Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah.

Prinsip-prinsip *Good Governance*dalam penyelengaran negara tidak lepas dari masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, tujuan di berlakukannya PP No 71 tahun 2010 adalah agar laporan keuangan lebih a*ccountabel* dan berkualitas. Informasi akuntansi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertiaan dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti disyaratkan dalam PP No. 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang

relevan dan mudah dipahami. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat. Menurut Imam S. Tunggal dan W. Tunggal (2002: 7), transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses).

Indra Bastian (2010: 274), menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi. Kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas di perlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dengan perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas layanan, responsifitas, responsibilitas, akuntabilitas serta persamaan pelayanan. Penerapan berbagai atauran perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam penerapan keuangan diharapkan dapat mewujudkan

pengelolaan pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatan kinerja pemerintah.

Dinas pemerintah daerah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Kebersihan Kota Palembang. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang terletak di jalan Sukarela No. 129 A KM.7 Palembang.Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang melayani pengangkutan sampah dari konsumen/*user* ke tempat pembuangan akhir dan membersihkan kota palembang agar terbebas dari sampah. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Governance*, hal ini terlihat berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan dengan wawancara terhadap pegawai Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang di temukan hasil sebagai berikut :

Tabel I.I
Hasil Penelitian Awal Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

NO	Keterangan	Hasil/Temuan
1	Transparansi	Belum adanya keterbukaan dalam memberikan informasi data laporan keuangan kepada masyarakat.
2	Akuntabilitas	Tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas terhadap anggaran yang di keluarkan kepada masyarakat.

Sumber: Data diolah, 2016

Prinsip transparansi pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang belum terlaksana secara maksimal dan kurangnya praktik yang sehat dalam keterbukaan pemberian informasi data laporan keuangan kepada publik atau masyarakat yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Sektor publik harus memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan

mengakses data laporan keuangan yang ada di badan publik, karena setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Selain dalam hal transparansi Dinas Kebersihan juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip Akuntabilitas, pelaksanaan anggaran dan dan tahap pelaporan anggaran publik tidak mendapatkan informasi yang jelas. Sehingga Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembangbelum bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap masyarakat luas, bahwa tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola anggaran yang di keluarkan kepada masyarakat.

Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang baik, diantaranya Lucy Auditya, dkk (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan tehadap kinerja pemerintah Bengkulu. Muhammad Firdiansyah Adiwirya, dkk (2015) dengan judul Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran kinerja. Dikaji secara parsial, ditemukan bahwa Transparansi tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Made Budi

Sastra Wiguna, dkk (2015) dengan judul Pengaruh Pengawasaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah TerhadapKinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulelang. Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan pengawasaan keuangan daerah, akuntabilitas dan trasnparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daeah kabupaten Bulelang sebesar 88,0%.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul**"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas makapenulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Paalembang?
2. Bagaimanakah pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Paalembang?
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Paalembang?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan akuntabilitas dan transparansi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja baik teori maupun dalam praktek.

2. Bagi Dinas Kebersihan dan keindahan Kota Palembang

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan terhadap pihak-pihak terkait untuk lebih mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi berbasis kinerja terhadap kinerja.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan terutama penerapan teori dan tambahan refrensi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pertama di lakukan oleh Lucy Auditya, dkk (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Analisis data yang di gunakan yaitu uji kualitas data, uji asusmsi klasik, uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji multiko lineritas, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja Provinsi Bengkulu. Transparansi keuangan pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja Provinsi Bengkulu jugaakan

jugaakan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.

Penelitian kedua di lakukan oleh Muhammad Firdiansya Ardiwirya (2015) yang berjudul Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar.Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilakukan di kota Denpasar dengan menggunakan metode kuesioner. Regresi liniear berganda digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis kinerja. Secara parsial ditemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja.

Penelitian yang ketiga di lakukan oleh Made Budi Sastra Wiguna, dkk (2015) yang berjudul Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah , Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulelang. Rumusan masalah adalah apakah terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengawasaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa kuesioner. Analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji linieritas, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskeastisitas. Hasil penelitian ini adalah secara simultan pengawasaan

keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kabupaten bulelang sebsar 88.0%.

Tabel II.I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Lucy Auditya, dkk, 2013 AnalisisPengaruhAkuntabilitas danTransparansiPengelolaanKeuangan Daerah TerhadapKinerjaPemerintah Daerah	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas.	Perbedaan terdapat pada objek penelitian. Penelitian sekarang dilakukan di Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.
Made Budi Sastra Wiguna, dkk, 2015 Pengaruh Pengawasaan Keuangan Darah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolalann Keungan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulelang.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas.	Perbedaan terdapat pada objek penelitian, dan terdapat pada variabel independet, penelitian sekarang hanya menggunakan akuntabilitas da ntransparansi sebagai variabel independent.
Muhammad Firdiansyah Ardiwirya, 2015 Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi	Perbedaan terdapat pada objek penelitian. Dan terletak pada variabel Penelitian sekarang hanya menggunakan kinerja sebagai variabel dependen.

Sumber: Penulis 2016

B. Landasan Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus di hormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencangkup eksistensi dari suatu mekanisme yang menyakinkan politisi dan pejabat pemerintah terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian target kebijaksanaan atau program.

Mardiasmo (2009: 20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Mardiasmo (2009: 22) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan *hukum (accoutability for probity and legality)*

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jumlah adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di syaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah di setujui dan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

2) Akuntabilitas proses *(process accountability)*

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses temanifestasikan melaui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif dan murah biaya. Pengawasaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiens dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontak tender adalah apakah *roses tender* telah dilakukan secara fair melalui *compulsory competitive tenderng*

(CCT) ataukah dilakukan melalui pola korupsi dan Nepotisme (KKN). *Proces accountability* dalam hal ini di gunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melasanakan kegiatan yang ditentukan *(planing, allocating and managing).*

3) Akuntabilitas program *(program accountability)*

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Program *accountability* disini dan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut *(outcmes and effectiveness)*

4) Akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertangungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan manfaatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Dalam hal ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak *(value).*

Menurut Sulistino (2003: 23) pemerintah yang *accountabel* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaran secara terbuka,cepat, tepat kepada masyarakat.

b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

d) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional

e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatanpemerintah.

b. Fungsi dan Jenis Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas yaitu:

1) Menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang di ambil selama beroperasinya suatu entitas (satuan usaha tersebut)

2) Memungkin kan pihak luar (misalnya legislatif,auditor dan masyarakat luas) untuk mereview informasi tersebut.

3) Mengambil tindakan koreksi jika dibutuhkan.

c. Jenis Akuntabilitas yaitu:

Menurut Mardiasmo (2009: 21) Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yiatu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accounttability)*

Adalah setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegitan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan atau pun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*Public or external accountability and environment).*

2. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance.* Transparansi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan,

lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Menurut Imam S. Tunrggal dan W. Tunggal (2002: 7) transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses)

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan taranparansi jika memenuhi kriteria berikut:

1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses
3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4) Terakomodasinaya suara atau usulan rakyat
5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan daerah bersih, efektifitas, efisiensi, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Karakteristik Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009: 19) karakteristik transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut:

1)Informatif *(informativeness)*

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2) Keterbukaan *(openess)*

Keterbukaaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat dapat di akses oleh pengguna informasi publik, selain dari informasi yang di kecualikan yang diatur oleh undang-undang.

3) Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders)* atasaktivitas dan kinerja finansial.

3. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Indra Bastian (2010: 274), menyatakan bawah kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi.

Mulyadi (2007: 337) menyatakan bahwa kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prilaku yang diharapkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil akhir dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Indra Bastian (2010: 267), menyatakan bahwa Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

1) Indikator masukan (*inputs*) adalah segalah sesuatu yang di butuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2) Indikator keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

3) Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4) Indikator manfaat *(benefits*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

b. Syarat-syarat Kinerja

Indra Bastian (2010: 267), menyatakan bahwa sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja yang berkesimpulan sama.

3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.

4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.

5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/ penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

6) Efektif, data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang harus bersangkutan dapat disimpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

c. Faktor-faktor Mempengaruhi Kinerja

Mahmudi (2010: 20), menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

1) Faktor personal individu

Faktor personal individu meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki setiap individu.

2) Faktor kepemimpinan

Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan lingkungan yang diberikan manajer dan team *leader*.

3) Faktor tim

faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

4) Faktor kontekstual

Faktor kontekstual meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

C. Hipotesis

H_1: Terdapat Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

H_2: Terdapat Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Menurut Sugiyono, (2009:53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplansinya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpamembuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian komparatif

   Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan yang variabelnya sama dengan penlitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

   Jenis penelitian ini yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan Kota Palembang yang terletak di jalan Sukarela no. 129 A KM.7, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153, telpon: 0711415130

C. Operasionalisasi variabel

Tabel III.1
Oprasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjaabnya kepada pihak pemebri amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintapertanggungjawaban	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum *(accountability for probity and legality)* 2. Akuntabilitas Proses *(Process Accountability)* 3. Akuntabilitas Program *(Program Accuontability)* 4. Akuntabilitas Kebijakan *(Policy Accountability)*
Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja (X_2)	Transparansi kinerja keuangan dinas, baik ketapan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses)	1. Informatif*(informativeness)* 2. Keterbukaan*(openess)* 3. Pengungkapan
Kinerja (Y)	Kinerja adalah kebershasilan personil,tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah di tetapkan sebelumnya dengan perilaku yang di harapkan.	1. Masukan *(inputs)* 2. Keluaran *(outputs)* 3. Hasil *(outcomes)* 4. Manfaat *(benefit)* 5. Dampak *(impact)*

Sumber Penulis: 2016

D. Populasi dan Sampel

Wiratma (2014: 65) Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karkteristik dan kualitas tertentu yang di terapkan oleh penelitian dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja pada Dinas Kebersihan Kota Palembang. Sampel adalah bagian dari populasi karekteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Teknik pengambilan sampel yang akan di lakukan yaitu *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Tabel III.2
Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Sub bagian TPA dan Limbah	8
2	Sub bagian umum dan kepegawaian	4
3	Sub bagian keuangan	5
4	Subbagian perencanaan dan evaluasi	5
5	Sub bagian Retribusi	4
6	Sub bagian sarana dan prasarana	4
Total		30

Sumber: Penulis 2016

Menurut Sugiyono (2010: 90) Sampel adalah " bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Semua popilasi yang ada dalam penelitian ini semua nya dijadikan sampel penelitian.

E. Data yang diperlukan

Husein (2011: 42) data penelitian pada dasar nya dapat di kelompokan menjadi :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa di lakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang di olah lebih lanjut dan di sajikan baik oleh pihak pegumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder Data primer di peroleh dengan menyebarkan kuesioner pada karyawan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang. Data sekunder adalah kuesioner yang telah disebarkan kemudian diolah menjadi data.

F. Metode Pengumpulan data yang akan di gunakan

Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara)

   Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kuesioner disebarkan kepada karyawan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang. Wawancara yaitu komunikasi langsung dengan kepala sub bagian keuangan yang bekerja pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

G. Analisis data dan teknik analisis yang akan di gunakan

1. Analisis data

Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang di sesuaikan dengan penelitian yang di lakukan untuk menilai hasil dari pengisian kuesioner. Hasil penelitian kuesioner yang dilakukan oleh responden tersebut di uji melalui pengujian statistik. Pengujian statistik dalam penelitian ini di bantu oleh aplikasi program *Statistical Product and Sevice Solution* (SPSS).

Sugiyono (2012: 132) terdapat beberapa skala pengukuran yang dapat di gunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Skala yang dapat di gunakan dalam penelitian, yaitu :

1) Skala *Likert*

Skala *Likert* adalah skala yang di gunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi sesorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

2) Skala *Gutmon*

Skala *Gutmon* adalah skala yang di gunakan bila peneliti ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan.

3) Rating *Scale*

Rating *Scale* adalah mengelolah data yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam penelitian kualitatif.

4) Sematic *Deferential*

Sematic *Deferential* adalah data yang di gunakan untuk mengukur sikap atau karekteristik tertentu yang dimiliki sesorang.

Keempat jenis skala diatas bila digunakan dalam pengukuran akan memperoleh data interval rasio, hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Jenis skala yang di gunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Berdasarkan indikator variabel yang diukur dan dijadikan tolak ukur untuk dilakukannya penyusunan item-item instumen berupa pertanyaan. Jawaban pada skala *likert* dengan pengkuantitafan adalah sebagai berikut :

Sangat Setuju	= SS di kuantitatifkan = 5
Setuju	= S di kuantitatifkan = 4
Ragu	= R di kuantitatifkan = 3
Tidak Setuju	= TS di kuatitatifkan = 2
Sangat Tidak Setuju	= STS di kautitatifkan = 1

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi harus data interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk skala oridinal dinaikan menjadi interval.

2. Teknik Analisis

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan diolah dengan menggunakan rumusan yang sudah ditentukan. Peneliti menganalisis mengunakan teknik kuantitatif, dimana terdapat tiga teknik analisis dalam penelitian, yaitu:

a. Uji Validitas

Sugiyono (2013: 352) validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah " data yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu kuesioner mampu mengungkapan sessuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Dapat disimpulkan validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas dengan menggunakan alat bantu program statistik dengan kriteria sebagai berikut :

1) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r$ tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid.

2) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} < r$ tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

3) r_{hitung} dapat dilihta pada kolom *Corrected Item* Total Corelation.

b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2013: 354) uji reliabilitas berkenan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan, dalam pandangan *Positivistic* (Kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih penelitian dalam objek yang sama. Atau penelitian sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila di pecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda.

Teknik statistik ini di gunakan untuk pengujian dengan koefisien *Combach'sAlpha* dengan bantuan software SPSS. *Combach'sAlpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan realibel jika memiliki koefisien *Combach'sAlpha*>0,6 Dasar dari pengujian uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1) Combach'sAlpha>0,6 _ *combach's Alpha acceptable (construct reable).*

2) Combach'sAlpha<0,6 _ combach's Alphapoor acceptable (construct reable).

c. Uji Normalitas Data

Santoso (2012:234) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel penggagung atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas model regresi yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot)). Dalam melakukan pengujian normalitas untuk peneliian ini mnggunakan Normal P-P plot. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitasyaitu :

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distibusi normal, maka model regresi memenuhi asusmsi normalitas.
2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrogam tidak menunjukan pola distibusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tid berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendektesi gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 tidak terjadi autokorelasi.

2) Uji Multikolonieritas

Sumanto (2014: 165) uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah menguji model regresi ditmukan adanya korelasi antar variabel bebas *(IndependentVariabel)*. Untuk mendektesi apakah terjadi multikolonieritas dapat diliah ddari nilai tolorance dan variance inflation factor (VIF).

Melihat nilai tolorance:

a. Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih besar 0,10
b. Terjadi multikolonieritas, jika nilai tolerance lebih kecil dari atau sama dengan 0,10

Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor) :*

a. Tidak Terjadi multikolonieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00
b. Terjadi multikolonieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji appakah metod regresi terjadi ketidaksamaan suatu residual satu pengamatan kepada pengamat lainnya. Geejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat R2 yang sangat kecil, dan uji t yang tidak signifikan. Jika &>X^2 (m-1),, maka ditolak hipotesis yang menyatakan homokedastisitas, atau dengan kata lain residual model

diatas adalah heterokeditas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskidastisitas.

e. Uji Hipotesis

Sugiyono (2013: 93) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka perlu di lakukan pengujian atas hipotesis dengan uji sebagai berikut :

1) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hopitesis secara simultan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda deng X_1 dan X_2 secarabersama-sama mempengaruhi Y. Lngkah-langkah dalam menguji hipotesis secara simultan yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_{02}: Tidak Terdapat Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

H_a: Terdapat Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel di tentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (a) berarti nilai F_{tabel}, taraf nyata dari F_{tabel} di tentukan dengan derajat bebas (db) =n-k-l.

c) H_o ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan, H_a diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$

d) Kesimpulan.

2) Uji Hipotesis Secara Parsial

Pengujian Hipotesis secara parsial merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X1 atau X2 yang mempengaruhi Y. langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$H_{01,}$: Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas anggaran berrbasis kinerja terhadap kinerja

$Ha_{1.1}$: Terdapat pengaruh akuntabilitas secara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja.

$H0_{1.2:}$ Tidak Terdapat pengaruh Transparansi anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap kinerja

$Ha_{1.2}$: Terdapat pengaruh Transparansi anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap kinerja.

b) Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyataa dari tabel t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (a) berartti nilai t_{tabel}, taraf nyata dari f_{tabel} ditentukan denggan menggunakan derajat bebas (db) = n-k-l.

c) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel. Berdasarkan probabilitas Ho ditolak jika P value < 5%, Ha diterima jika p valuue > 5%.

d) kesimpulan.

f. Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2013: 277) analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih, variable independent (X1, X2) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi, analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen nya minimal dua. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda persamaan berikut:

$Y = a + b1\ X1 + bx2$

Keterangan:

Y= Kinerja

a = konstantan (nilai Y bila X=0)

b1= koefisien regresi Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja

b2= Koefisien regresi Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja

X1= Akuntabilitas

X2= Transparansi

e= erorr/ residual

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

a. Sejarah singkat Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

Dinas kebersihan dan keindahan kota palembang (DKK) merupakan suatu dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanaka program kebersihan dan keindahan kota palembang dengan berpijak pada peraturan yang berlaku. Berdirinya DKK koota palembang berdasarkan : SK walikota Palembang Nomor 77/UM/WK tanggal 17 Juni 1971 tentang urusan kebersihan kota, pertamanan, pembersihan, riolering dan pemakaman dari pekerjaan umum menjadi urusan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang adalah unsur pelaksana pemerintahan daaerah kota Palembang dalam rangka desentralisasi dan melakukan tugas pembentukan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan betanggungjawwab kepada wali kota palembang.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Mewujudkan masyarakat palembang berorientasi daur ulang

2) Misi

(a) Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan.

(b) Menumbuh kembangkan budaya 3R sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

(b) Menumbuh kembangkan budaya 3R sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

(c)Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola persampahan secara terpadu.

(d)Memperpanjang usia TPA dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah.

(e)Menjalin kerjasama antar daerah dan pihak ketiga dalam mengelola persampahan.

c. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

Setiap organisasi, keberadaannya sangat penting sekali, baik kelancaran maupun efektivitas organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan setiap tugas seseorang di dalam suatu organisasi, sehingga jelas batas-batasnya, hubungan, wewenangnya, dan tanggung jawabnya dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Disamping itu struktur organisasi tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, karena dengan adanya struktur organisasi maka kegiatan-kegiatan yang ada pada dinas yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara teratur dan terarah.

Struktur Organisasi

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

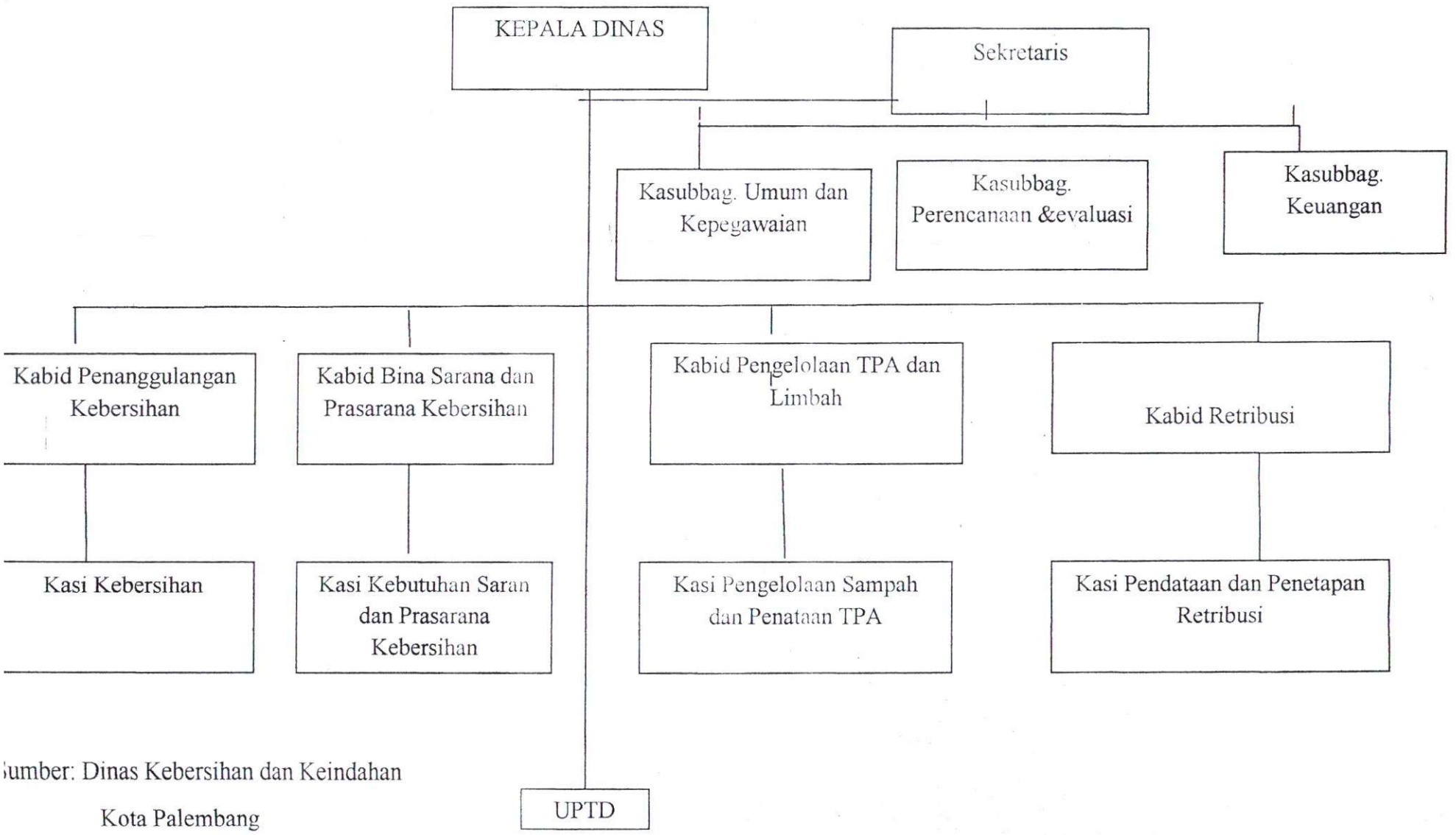

Sumber: Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

d. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

Uraian tugas dan fungsi aparat Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

(a) Membatu pemerintah sebagai Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.

(b) Menyusun program/rencana kerja DinasKebersihan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(c) Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian/Dinas/Instansi Badan/Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(d) Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langka-langkah strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang Dinas dan Sekretaris dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(e) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

(f) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Sekretaris Dinas

(a) Mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(b) Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian/ Dinas/ Instansi/Kantor/Lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketata-usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(d) Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(f) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Program, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja serta petunjuk tata laksana administrasi umum

3) Tugas subbagian umum dan kepegawaian

(a) Mengurus surat menyurat dan mengelola arsip

(b) Melaksanakan urusan administrasi keuangan

(c) Menyiapkan bagan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai

(d) Memutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian

(e) Membantu pelaksanaan tugas pada bagian sekretariat

4) Tugas subbagian perencanaan dan evaluasi

(a) Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Menyusun pedoman dan pembinaan pengembanganterhadap sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis dilapangan

(d) Menyusun rencana kegiatan dan penyuluhan dibidang kebersihan

(e) Melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Kebersihan

(f) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan nya

5) Subbagian Keuangan

(a) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, kegiatannya berupa penyunduhan anggaran belanja dinas serta pembukuan kas

(b) Membantu melaksanakan tugas pada bagian sekretariat

6) Tugas Kepala Bidang Penanggulangan Kebersihan

(a)Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja dibidang kebersihan lingkungan, pemusnahan sampah

(b) Pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, dan pemusnahan sampah

(c) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan

(d) Plaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan, pemusnahan/ pemanfaatn sampah, pengurasan saluran/drainase serta pelaanan pemanfatan air kotor dan limbah tinja .

7) Tugas Kepala Bidang Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan

(a)Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup sarana dan prasarana

(b) Penyususnan petunjuk teknis dilingkup sarana dan prasarana

(c) Pelaksanaan sarana dan prasarana dilingkup pengadan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana

(d) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup sarana dan prasarana

8) Tugas kasi kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan

(a) Menyiapkan bahan operasional kebersihan

(b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan basis data seksi kebersihan sebagai bahan penyususnan rencana kegiatan

(c) Pelaksanaan koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya

(d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja seksi kebersihan yang meliputi sarana dan prasarana, pelayanan kebersihan

9) Tugas Kepala Bidang Pengelolaan TPA dan Limbah

(a) Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup pengelolaan sampah

(b) Penyususna petunjuk teknis lingkup pengelolaan sampah

(c) Pelaksanaan pengelolaan samapah dilingkup pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir(TPA), dan isntalasi pengelolaan limbah

(d) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup pengelolaan sampah

(e) Pelaksanaan monotoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup pengelolaan sampah

(f) Pelasanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan sarana dan pertimbangan dilingkup pengelolaan sampah

10) Tugas Kasi pengelolaan sampah dan penataan TPA

(a) Membantu kepala bidang kebersihan lingkungan dan persamapahan dalam melaksanakan tugasnya di seksi pengelolaan persampahan

(b) Menyususn rencana kegiatan pengelolaan persampahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(c) Melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan berdassarkan pada perencanaan kegiatan yang telah di susun.

(d) Melakukan survei dan pendataan terhadap lokasi penumpukan sampah untuk memudahkan dalam melakukan proses pengelolaan persampahan

(e) Melakukan pembuatan dan rehabilitas terhadap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

(f) Mengatur dan melaksanakan proses pemusnahan dan pemanfatan sampah yang telah diangkut ke TPA di tempat yang telah di tentukan.

11) Tugas Kepala Bidang Retribusi

(a) Melakukan pendataan dan pemantuan wajib retribusi sampah.

(b) Mealakukan kegiatan penagihan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

(c) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanan pemungutan retribusi.

11) Tugas Kasi Pendataan dan penetapan retribusi

(a) Membantu Kepala bidang retribusi.

(b) Menerbitkan surat ketetapan retribusi dan menetapkan jumlah angsuran pembayaran retrbusi

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Karekteristik Variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas diantaranya, Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), Variabel terikat adalah Kinerja (Y), butir pertanyaan pada variabel bebas pertama (X_1) berjumlah 11 pertanyaan yang terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran terdiri dari 3 pertanyaan, akuntabilitas proses 3 pertanyaan, akuntabilitas program 3 pertanyaan, akuntabilitas kebijakan 2 pertanyaan. Variabel bebas kedua (X_2) terdiri dari 9 pertanyaan yang terdiri dari informatif 3 pertanyaan, keterbukaan 3 pertanyaan, pengungkapan 3 pertanyaan. Variabel terkait Y terdiri dari13 pertanyaan yang terdiri dari masukan 2 pertanyaan, keluaran 3 pertanyaan, hasil 3 pertanyaan, manfaat 2 pertanyaan, dampak 3 pertanyaan. Tujuan di berikannya pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh

akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

Data ordinal yang sudah diberikan skor tersebut kemudian di susun kedalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai analisis dalam penelitian ini. Kemudian skor atas jawaban dari responden kemudian di jumlahkan. Rekapitulasi data mengenai jawaban dari responden tentang akuntabilitas (X_1), transparansi keuangan(X_2), kinerja (Y) dapat dilihat berikut:

TABEL IV.2
Hasil total Jawaban Responden
Data ordinal dan Data Interval

Data Ordinal				Data Interval		
Responden	X_1	X_2	Y	X_1	X_2	Y
1	49	36	58	33,990	27,248	39,822
2	46	37	52	29,558	26,849	31,759
3	42	37	59	25,153	27,033	41,094
4	46	41	57	29,558	32,383	39,204
5	50	38	65	38,435	28,526	49,964
6	41	32	51	24,357	22,504	32,690
7	50	41	58	35,079	32,202	39,999
8	41	23	47	24,082	14,960	28,792
9	47	35	57	32,215	25,997	39,050
10	48	34	58	32,192	24,301	40,275
11	52	41	55	38,313	32,091	37,610
12	48	42	56	32,402	33,337	37,037
13	51	44	58	36,857	36,028	39,935
14	49	30	59	33,900	20,289	41,526
15	41	42	53	23,485	33,478	33,992
16	52	27	58	38,188	17,987	40,583
17	50	38	61	35,364	28,545	44,502
18	44	36	61	27,682	27,185	44,242
19	49	32	62	33,652	22,214	45,734
20	50	29	51	35,444	20,126	32,925
21	47	41	57	30,822	31,881	38,513
22	46	33	55	30,436	24,160	36,702
23	45	37	48	28,072	28,493	29,547
24	51	37	52	36,729	28,637	31,779
25	49	33	53	33,900	23,474	32,989
26	48	45	60	32,326	37,386	42,952
27	50	34	58	35,366	25,342	40,070
28	48	32	59	32,307	21,931	41,151
29	50	37	61	35,293	27,152	44,190
30	53	37	56	39,737	27,152	37,260

Sumber: data primer diolah 2016

2. Karakteristik Responden

a. Karakteristik responden berdasarkan usia

Kriteria responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.3

Tabel IV.3
Kareaktersitik responden berdasarkan usia

No	Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	20-35	18	60%
2	36-50	12	40%
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usia responden terbnyak adalah yang usianya antara 20-35 dan usiayang paling sdikit adalah nya anatar 36-50.

b. Kriteria responden berdassarkan Jenis Kelamin

Kriteria responden berdasarkan jenis kelamin penelitian digunakan untuk membedakan responden laki-laki dan perempuan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.4:

Tabel IV.4
Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Perempuan	15	50%
2	Laki-laki	15	50%
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden anatra laki-laki dan perempuan berjumlah sama.

c. Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan jenjang d dibagi menjadi dua kategori, yakni: dari Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sarjana. Jumlah responden berdasarkan jenjeang pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.5

Tabel IV.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

N0	Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sekolah Mengah Atas	5	16,67%
2	Sarjana	25	83,34%
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden terbanyak memiliki jenjeang pendidikan Sarjana sedangkan jenjang pendidikan SMA sedikit.

d. Karakteristik responden berdasarkan jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel IV.6

Tabel IV. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Keterangan	Jumlah
1	Sub bagian TPA dan Limbah	8
2	Sub bagian umum dan kepegawaian	4
3	Sub bagian keuangan	5
4	Subbagian perencanaan dan evaluasi	5
5	Sub bagian Retribusi	4
6	Sub bagian sarana dan prasarana	4
Total		30

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja terdiri dari dua kategori, yakni: kurang dari 5 tahun dan lebih dari 5 tahun jika pegawai lebih dari 10 tahun bekerja maka pegawai tersebut akan mengetahui dengan bailk mengenai budaya organisasi dalam pemerintahan daerah secara menyeluruh sedangkan pegawai dengan masa keseluruh kurang dari 5 tahun belum cukup mengetahui budaya organisasi dalam pemerintahan. Jumlah responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel IV. 7

Tabel IV.7
Karakteristik responden berdasrkan masa kerja

No	Masa Kerja	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Kurang dari 5 tahun	7	23,34%
2	Lebih dari 5 tahun	23	76,67%
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah pegawai dengan masa kerja lebih dari 5 tahun sedangkan jumlah responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun lebih sedikit. Artinya pegawai yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun lebih mempunyai pengalaman dan pengetahuan budaya organisasi pemerintahan.

3. Pembahasan

Pengaruh akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja dinas kebersihan dan keindahan kota palembang dengan menggunakan tabelarasi dengan kuesioner yang diterima sebanyak 30, yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Publik

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut ini

Tabel IV.8
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator
Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran

Keterangan	P1		P2		P3	
	∑	%	∑	%	∑	%
Sangat Setuju	19	63,33%	20	66,66%	11	36,66%
Setuju	8	26,66%	8	26,67%	18	60%
Rgu-ragu	2	6,67%	2	6,67%	1	3,34%
Tidak Setuju	1	3,34%	0	0%	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel indikator dengan akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran. Pertanyaan pertama akuntabilitas kejujuran digunakan dalam menyususn anggaran untuk mencapai sasaran kinerja, diketahui 19 (63,33%)responden menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwa akuntabilitas kejujuran berpengaruh terhadap pencapaian sasaran kinerja. 1(3,34%) responden menyatakatn tidak setuju dengan alasan akuntabilitas kejujuran tidak berpengaruh dalam menyususn anggaran.

Pertanyaan kedua, penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, Diketahui 20 (66,66%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan agar tidak

adanya kesalahan dalam penggunaan dana anggaran. 2 (6,67%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa masih adanya penggunaan dana anggaran tidak berdasarkan hukum dan aturan. Pertanyaan ketiga, anggaran yang dirancang sesuai dengan aturan yang dilandaskan hukum guna memebrikan hasil kinerja yang baik, diketahui 18 (60%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa anggaran yang dirancang berdasarkan aturan akan menghasilkan kinerja yang baik. 1 (3,34%)responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa tidak adanya pengaruh dalam merancang anggaran sesuai aturan.

2) Akuntabilitas Proses

Hasil rekapitulasi jawaban akuntabilitas proses dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut ini:

Tabel IV.9
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Proses

Keterangan	P4		P5		P6	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	10	33,33%	8	26,66%	10	33,33%
Setuju	17	56,67%	22	73,34%	17	56,67%
Rgu-ragu	3	10%		0%	2	6,66%
Tidak Setuju	0	0%	0	0%	1	3,34%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.9 indikator dengan akuntabilitas proses. Pertanyaan keempat pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku, diketahui 17 (56,67%) responden

menyatakan setuju dengan alasan agar pengalokasian dana mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 3 (10%) responden menyatakan ragu-ragu karena masih ada nya pengalokasian dan yang tidak mengikuti proses. Pertanyaan kelima, proses dan pertanggungjawaban diawasi terus menerus, diketaui 22 (73,34%) responden menyatakan setuju dengan alasan agar pengalokasian dana mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 8 (26,67%) respondenmenyatakan setuju agar anggaran tepat sasaran.

Pertanyaan keenam, Prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi, diketahui 17 (56,67%)responden menyatak setuju dengan alasan bahwa tugas akan lebih baik apabila didukung sistem yang baik. 1 (3,34%) responden menyatakan tidak setuju karena sistem yang baik tidak berpengaruh terhadap pelasanaan tugas.

3) Akuntabilitas program

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator akuntabilitas program dapat dilihat paa tabel IV.10

Tabel IV.10
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Program

Keterangan	P7		P8		P9	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	12	40%	14	46,67%	15	50%
Setuju	15	50%	13	43,33%	13	43,33%
Rgu-ragu	2	6,66%	3	10%	2	6,67%
Tidak Setuju	1	3,34%	0	0%	0%	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0%	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.10 indikator dengan akuntabilitas program. Pertanyaan ketujuh Program-program anggaran di rancang dengan mempertimbangkan prinsip efesiensi untun menghasilkan kinerja yang maksimal, diketahui 15 (50%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa merancang prinsip efisiensi akan menghasilkan anggaran yang efisien. 1 (3,34%)responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa tidak adanya pengaruh prinsip efisiensi dalam kinerja yang maksimal.

Pertanyaan delapan Program-program anggaran di rancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau kepentingan publik, diketahui 14 (46,67%) responden menyatak sangat setuju dengan alasan bahwa dana yang telah dianggarkan harus tepat guna. . 3 (10%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa tidak adanya pengaruh efektifitas dalam penggunaan anggaran. Pertanyaan sembilan

Pelaksanaan program-program penyususnan anggaran benar-benar di rasakan manfaatnya untuk meningkatkan kinerja, diketahui 15(50 %) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwa apabila anggaran yang disusun tepat sasaran maka kinerja yang didapat akan menjadi baik. 2 (6,67) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa tidak adanya pengaruh penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator akuntabilitas kebijakan dapat dilihat pada tabel IV.11

Tabel IV.11
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas Kebijakan

Keterangan	P10		P11	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	10	33,33%	7	23,33%
Setuju	19	63,33%	20	66,67%
Rgu-ragu	1	3,34%	2	6,66%
Tidak Setuju	0	0%	1	3,34%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.11 indikator dengan akuntabilitas kebijakan. Pertanyaan sepuluh Kebijakan atau aturan yang di buat oleh pemerintah berguana dalammengevaluasi kinerja, diketahui 19 (63,33%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa. 1(3,34%) responden menyatakan ragu-ragu deng alasan. Pertanyaan sebelas Restrada dan arah kebijakan umum anggaran meruapakn

dasar dalam pegelolaan anggaran, diketahui 20 (66,67%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa. 1 (3,34%) responden menyatakan tidak setuju.

b. Transparansi Keuangan

1) Informatif

Rekapitulasi jawaban responden indikator informatif dapat dilihat padda tabel IV.12

Tabel IV.12
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Informatif

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	10	33,33%	7	23,33%	8	26,66%
Setuju	10	33,33%	12	40%	13	43,34%
Rgu-ragu	7	23,34%	9	30%	4	13,34%
Tidak Setuju	3	10%	2	6,67%	5	16,66%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel informatif . pertanyan pertama Pegumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi, diketahui 10 (33,33%) responden menyatak sangat setuju dengan alasan bahwa pengumuman anggaran kepada masyarakat berpengaruh dalam meningkatkan transparansi. 3 (10%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa tidak adanya pengaruh pengumuman anggaran dalam meningkatkan transparansi.

Pertanyaan kedua Informasi yang di berikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran, diketahui 12 (40%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa publik dapat mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut dikeluarkan. 2(6,67%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa anggaran tersebut merupakan rahasia internal.

Pertanyaan ketiga Mudah untuk mengakses dokumenpublik tentang anggaran, diketahui 13(43,34%) responden menyatak an setuju dengan alasan bahwa dinas merupakan sektor publik jadi publik berhak atas dokumen publik. 4(13,34%) responden mentakan ragu-ragu karena anggaran merupakan rahasia instansi pemerintahan.

2) Keterbukaan

Rekapitulasi jawaban responden indikator keterbukaan dapat dilihat pada tabel IV. 13

Tabel IV.13
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keterbukaan

Keterangan	P4		P5		P6	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	8	26,66%	10	33,33%	16	53,33%
Setuju	16	53,34%	16	53,33%	12	40%
Rgu-ragu	4	13,33%	3	10%	2	6,67%
Tidak Setuju	2	6,67%	1	3,34%	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Berdasarkan tabel IV.13 indikator keterbukaan. Pertanyaan keempat Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis, diketahui 16 (53,34%) responden menyatakan setuju dengan alasan. 2 (6,67%) responden menyatakan tidak setuju. Pertanyaan kelima Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran, diketahui 16 (53,33%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa dengan bermusyawarah dapat mengetahui anggaran yang digunakan. 1 (33,34%) responden menyatakan tidak setuj dengan alasan bahwa musrenbang tidak berpengarh dalam transparansi.

Pertanyaan keenam Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu, diketahui 16 (53,33%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwa agar dapt melihat kinerja pegawai setiap tahunnya. 2 (6,67%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa laporan pertanggungjawaban apakah selalu tepat waktu.

3) Pengungkapan

Rekapitulasi jawaban indikator pengungkapan dapat dilihat pada tabel IV.14

Tabel IV.14
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengungkapan

Keterangan	P7		P8		P9	
	∑	%	∑	%	∑	%
Sangat Setuju	10	33,33%	8	26,66%	6	20%
Setuju	13	43,33%	18	60%	18	60%
Rgu-ragu	6	20%	1	3,34%	2	6,66%
Tidak Setuju	1	3,34%	2	6,66%	3	10%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	1	3,34%	1	3,34%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.14 rekapitulasi jawaban indikator pengungkapan. Pertanyaan ketujuh Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan atau suara rakyat, diketahui 13 (43,33%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa rakyat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 1 (3,34%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa tidak ada pengaruh transparansi anggaran dalam ususlan rakyat. Pertanyaan delapan Pengumumuman tentang anggaran bisa di dapat setiap waktu, diketahui 18 (60%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa publik dapat mengetahui anggaran yang digunakan. 1 (3,34%) responden menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan bahwa anggaran merupakan rahasia untuk publik. Pertanyaan sembilan Pengumuman kebijakan anggaran mudah di dapatkan oleh publik, diketahui 18 (46,7%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa dinas merupakan sektor publik jadi publik dapat mengetahui kebijakan anggaran yang dikeluarkan. 1 (3,34%)

responden menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan bahwa anggaran merupakan rahasia pemerintah.

c. Kinerja

1) Masukan

Hasil rekapitulasi indikator masukan dapat dilihat pada tabel IV.15

Tabel IV.15
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Masukan

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	21	70%	10	33,33%
Setuju	4	13,33%	15	50%
Rgu-ragu	2	6,67%	3	10%
Tidak Setuju	3	10%	2	6,67%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.15 indikator masukan. Pertanyaan pertama Kinerja diukur berdasarkan tingkat dan besaran sumber dana yang didapat, diketahui 21(70%) responden menyatak sangat setuju dengan alasan bahwa semakin baik kinerja maka kegiatan yang diberikan semakin banyak dan anggaran untuk kegaitan semakin banyak pula. 2 (6,67%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa tidak adanya pengaruh dalam kinerja yang didapat dengan besarnya dana yang didapat. Pertanyaan kedua Kinerja diukur berdasarkan produk (barang dan jasa) dari program atau kegiatan, diketahui 15 (50%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa apabila program yang telah direncanakan

berjalan dengan lancar maka kinerja yang didapatkan akan baik pula. 2 (6,67%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan tidak ada pengaruh kinerja yang diukur berdasarkan produk yang dihasilkan.

2) Keluaran

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator keluaran dapat dilihat pada tabel IV. 16.

Tabel IV.16
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keluaran

Keterangan	P3		P4		P5	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	15	50%	13	43,33%	9	30%
Setuju	10	33,33%	16	53,33%	20	66,66%
Rgu-ragu	4	13,33%	1	3,34%	1	3,34%
Tidak Setuju	1	3,34%	0	0%	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV. 16 dengan indikator keluaran. Pertanyaan ketiga Kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan, diketahui 15 (50%) responden menyatak sangat setuju dengan alasan bahwa baik atau buruk hasil kerja dapat dilihat setelah kegiatan yang telah dilaksanakan. 1 (3,34%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa tidak ada pengaruh kinerja berdasarkan program yang dilaksanakan.

Pertanyaan keempat Anggaran selalu digunakan secara efisien dan hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan, diketahui 16 (53,33%) responden menyatak an setuju dengan alasan bahwa agar anggaran yang tersisa dapat digunakan untuk kegiatan yang akan datang. 1 (3,34%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa anggaran untuk suatu kegiatan telah ada dana nya masing-masing. Pertanyaan kelima Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, diketahui 20 (66,66%)responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa anggaran dikeluarkan hanya untuk kegiatan yang penting saja. 1 (3,34%) responden mentakan ragu-ragu dengan alasan bahwa banyaknya keperluan yang digunakan.

3) Hasil

Rekapitulasi jawaban responden indikator hasil dapat dilihat pada tabel IV.17

Tabel IV.17
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Hasil

Keterangan	P6		P7		P8	
	∑	%	∑	%	∑	%
Sangat Setuju	16	53,33%	11	36,66%	17	56,67%
Setuju	13	43,33%	16	53,34%	11	36,66%
Rgu-ragu	1	3,34%	3	10%	2	6,67%
Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.17 dengan indikator hasil. Pertanyaan keenam Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan, diketahui 16 (53,33%) responden menyatak sangat setuju dengan alasan bahwa semakin pencapain tujuan secara tepat dilaksanakan maka hasil yang didapatkan akan baik. 1 (3,34%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa tidak ada pengaruh yang terjadi antara anggaran dikelola secara efektif dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan.

Pertanyaan ketujuh Anggaran dikelola secara efisien dengan pengggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu, diketahui 16 (53,34,%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa anggaran yang dikelola secara efisiensi maka dapat mencapai tujuan. 3 (10%) responden mentakan ragu-ragu. Pertanyaan delapan Anggaran dikelola secara adil *(equity)* dan merata (*equality*) dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, diketahui 17 (56,67%) responden menyatak sangat setuju dengan alasan bahwa semua masyarakat mendapatkan pelayan publik yang sama. 2 (6,67%) responden mentakan ragu-ragu dengan alasan bahwa terlalu banyak masyarakat yang harus diperhatikan.

4) Manfaat

Hasil rekapitulasi jawaban manfaat dapat dilihat pada tabel IV.18

Tabel IV.18
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Manfaat

Keterangan	P9		P10	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	10	33,33%	15	50%
Setuju	19	63,33%	13	43,33%
Rgu-ragu	0	0%	2	6,67%
Tidak Setuju	1	3,34%	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%
Total	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.18 dengan indikator manfaat. Pertanyaan sembilan Anggaran dikelola secara merata dan penggunaan dana publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, diketahui 19 (63,34%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa sektor publik harus mengutamakan kepentingan publik. 1 (3,34%) responden menyatakan tidak setuju.Pertanyaan sepuluh Adanya peranan pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, diketahui 15 (50%) responden menyatak sangat setuju dengan alasan bahwa pemerintah harus memperjuangkan rakyatnya. 2 (6,67%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa masih adanya aspirasi daerah yang belum diperjuangkan.

5) Dampak

Hasil rekapitulasi jawaban dampak dapat dilihat pada tabel IV.19

Tabel IV.19
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Dampak

Keterangan	P11		P12		P13	
	∑	%	∑	%	∑	%
Sangat Setuju	13	43,33%	16	53,33%	11	36,66%
Setuju	15	50%	9	30%	16	53,34%
Rgu-ragu	2	6,67%	5	16,67%	3	10%
Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0%	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%	0%	0%
Total	30	100%	30	100%	30	100%

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.19 dengan indikator dampak. Pertanyaan sebelas Penerapan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran, diketahui 1(50%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa penggunaan anggaran yang baik harus hemat, tepat guna dan tepat sasaran. 2 (6,67%) responden menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa tidak ada pengaruh konsep 3E dalam penggunaan anggaran.

Pertanyaan dua belas Pemerintah mencapai Good Governance yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, ekonomis, efisien serta efektif, diketahui 16 (53,33%) responden menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwa pemerintah yang baik harus akuntabel dan transparansi. 5 (16,67%)responden mentakan ragu-ragu dengan alasan bahwa kepemerintahan yang baik tidak harus dilihat dari akuntabel atau pun transparansinya suatu pemerintahan.

Pertanyaan tiga belas Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik, diketahui 16 (53,34%) responden menyatakan setuju dengan alasan bahwa instansi pemerintahan bekerja untuk publik oleh sebab itu anggran akan lebih banyak untuk kepentingan publik. 3 (10%) responden menyatakan ragu-ragu.

a. Pengujian Data

1) Uji Validitas dan Reliabel Data

Data valid dan reliabel harus menjadi syarat dalam melakukan uji hipotesis penelitian agar hasil penelitian valid dan dapat dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, pengujian validitas dan reliabilitas data sangat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa data yang diterima penulis adalah valid dan reliabel. Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif tidak berubah apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Dengan kata lain, validitas adalah indeks yang menunjukan konsistensi suatu alat pengukuran didalam mengukur gejala yang sama.

(a) Uji Validitas

Uji Validitas *(Test of Validity)* dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang telah disusun telah memiliki validitas atau tidak hasilnya akan ditunjukan oleh suatu indeks sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur yang diinginkan.

Ada 30 responden yang menjawab pertanyaan. Maka nilai r untuk N=30 dengan taraf signifikan 5% adalah df= N-2 = 30-2= 28 di peroleh 0,361. Dikatakan valid jika nilai r hitung> nilai r tabel. Data yang diuji validitas adalah variabel akuntabilitas (X_1), Transparansi anggaran (X_2), dan kinerja (Y). Hasil pengujian masing-masing variabel tersebut diantaranya:

(1) Uji Validitas Variabel akuntabilitas (X_1)

Hasil uji validitas akuntabilitas (X_1) untuk masing-masing item dapat dilihat tabel IV. 20 berikut

Tabel IV.20

Hasil Uji Validitas

Variabel Akuntabilitas (X_1)

No Item	r hitung	r table	Keterangan
1	0,498	0,361	Valid
2	0,629	0,361	Valid
3	0,531	0,361	Valid
4	0,452	0,361	Valid
5	0,523	0,361	Valid
6	0,718	0,361	Valid
7	0,531	0,361	Valid
8	0,619	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.20 hasil uji validitas variabel akuntabilitas (X_1) diperoleh semua item valid karena nilai r hitung >r tabel.

(2) Uji Validitas Transparansi (X_2)

Hasil uji validitas transparansi (X_2) untuk masing-masing item dapat dilihat pada tabel IV. 21

Tabel IV.21

Hasil Uji Validitas

Variabel Transparansi(X_2)

No Item	r table	r hitung	Keterangan
1	0,590	0,361	Valid
2	0,610	0,361	Valid
3	0,717	0,361	Valid
4	0,534	0,361	Valid
5	0,756	0,361	Valid
6	0,719	0,361	Valid
7	0,619	0,361	Valid
8	0,634	0,361	Valid
9	0,590	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.21 hasil uji validitas variabel Transparansi (X_2) diperoleh semua item valid karena nilai r hitung >r tabel.

(3)Uji Validitas Variabel Kinerja (Y)

Hasil uji validitas Kinerja (Y) untuk masing-masing item dapat dilihat tabel IV. 22 berikut

Tabel IV.22

Hasil Uji Validitas

Variabel Kinerja (Y)

No Item	r table	r hitung	Keterangan
1	0,737	0,361	Valid
2	0,662	0,361	Valid
3	0,452	0,361	Valid
4	0,371	0,361	Valid
5	0,454	0,361	Valid
6	0,635	0,361	Valid
7	0,600	0,361	Valid
8	0,458	0,361	Valid
9	0,564	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.22 hasil uji validitas variabel Kinerja (Y) diperoleh semua item valid karena nilai r hitung >r tabel.

(b) Uji Reliabilitas

Setelah ditemukan bahwa item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dengan nilai r hitung> nilai r tabel, maka selanjutnya pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut, diuji reliabilitas nya. Untuk menentukan pernyataan *reliable* dapat ditentukan apabila item *cronbach* alpha lebih besar dari 0,6 semakin besar *Alpha* (mendekati 1) maka dikatakan pertanyaan tersebut cukup *reliable.*

Hasil uji reliabilitas untuk variabel akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), Kinerja (Y), dapat dilihat pada tabl IV.23 berikut

Tabel IV. 23

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha Item*	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
X_1	0,708	0,6	Reliabel
X_2	0,758	0,6	Reliabel
Y	0,709	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.23 hasil uji reliabilitas di peroleh semua variabel reliabel, karena memiliki *cronbach's alpha item* >0,6.

2) Uji Normalitas Data

Tujuan dilakukannya uji normalias adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan ujinormal P-P plot .Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabelIV. 24 berikut:

Tabel IV. 24

Hasil Uji Normalitas

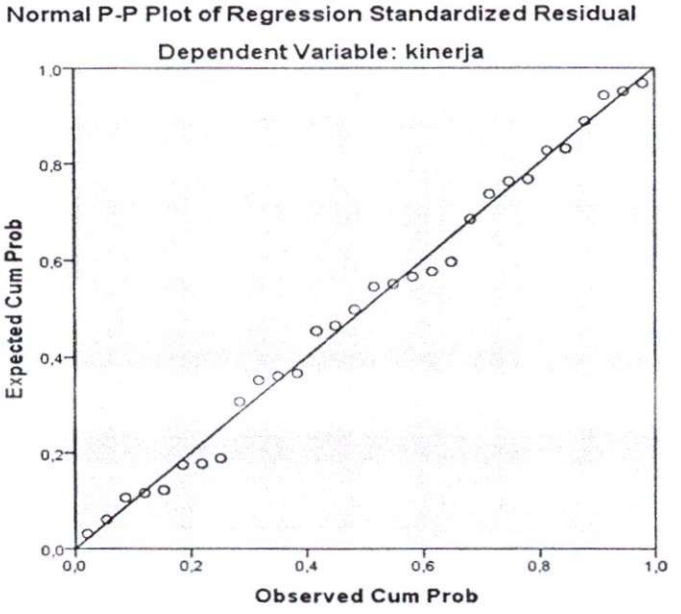

Dari hasil pengujian normalitas data tabel IV.24 diperoleh bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrogramnnya, maka model regresi memenuhi asusmsi normalitas.

3) Uji Asumsi Klasik

Uji asusmsi klasik adalah pernyataan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Sebelum data diuji perlu diketahui apakah data melanggar asusmsi dasar, oleh karena itu perlu dilakukan uji asusmsi klasik, setidaknya ada empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil keempat uji asumsi klasik tersebut, diantaranya:

(a) Uji Autokolerasi

Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikan tidak kuat. Jika nilai Durbin Watson (DW) berkisar -2 sampai+2 menunjukan bahwa tidak terjadi autokorelasi

Tabel IV.25
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,424[a]	,180	,119	4,717.943	1,590

a. Predictors: (Constant), transparansi, akuntabilitas

b. Dependent Variable: kinerja

Berdasarkan hasil pengujian diatas, Nilai DW adalah 1,590 yang berarti nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model dalam penelitian ini

(b) Uji Multikolonieritas

Untuk mengetahui bahwa data terbebas dari gejala multikolonearitas adalah jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan terbebas dari multikolonearitas , VIF=1 / tolerance, jika VIF= 10, maka tolerance 1/10= 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah tolerance. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel IV. 25

Tabel IV. 26

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas	,992	1,008
Transparansi	,992	1,008

a. Dependent Variable: kinerja

Berdasarkan uji multikolonieritas diatas diketahui bahwa nilai tolerance variabel Akuntabilitas (X1) dan variabel Transparansi (X2) yakni 0,992 lebih besar dari 0,10. sementara itu, nilai VIF variabel Akuntabilitas (X1) variabel Transparansi (X2) yakni 1,008 sehingga lebih kecil dari 10,00. sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

(c) Uji Heteroksidastisitas

Gejala heteroskidastitas dapat dideteksi dengan caramelihat nili R2 yang sangat kecil dari uji t dan uji f yang tidak signifikan atau dapat dilihat melalui grafik dan gambar scaterr plot. Berikut merupakan tabel hasil pengujian heteroskedastitas dapat dilihat pada tabel IV.27

Gambar IV.27

Uji Heterokedastisita

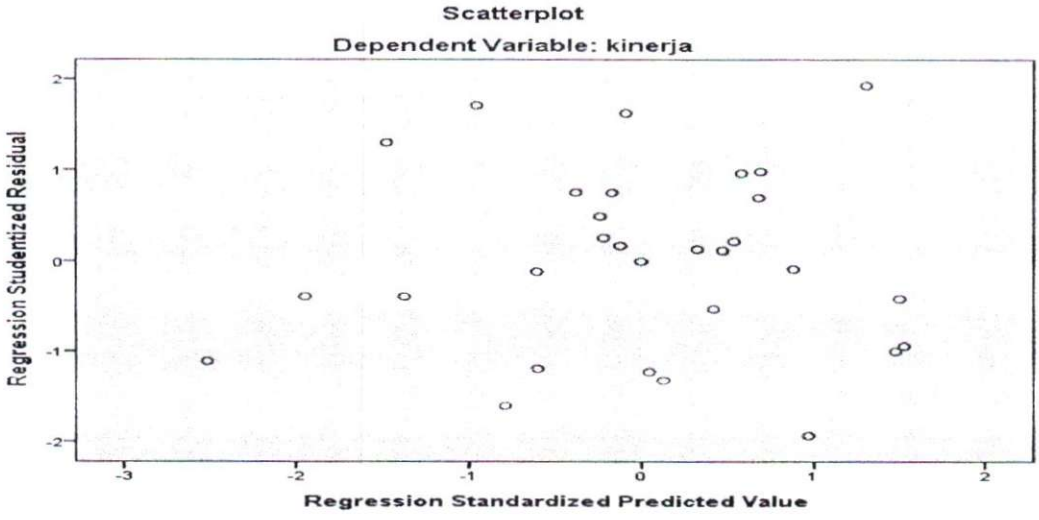

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut menyebar secara tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

(d) Uji Hipotesis

1) Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hipotesis dilakukakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja dinas kebersihan dan keindahan kota palembang secara simultan dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji F).

Hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat tabel IV.23 berikut:

Tabel IV.28

Hasil Hipotesis Secara simultan

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	131893116,3	2	65946558,19	2,963	,069[b]
Residual	600992722,8	27	22258989,73		
Total	732885839,2	29			

a. Predictors: (constantant), transparasi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424[a]	,180	,119	4,717.943

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja

tabel IV. 25 hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 2,963 sedangkan, nilai F_{tabel} untuk taraf nyata (a) sebesar 5% df pembilang (k=2) jadi k-l = 1 dan df penyebut = n-k-l = (30-2-1) = 27 adalah sebesarn0,3673 dengan kata lain $F_{hitung} > F_{tabel}$ (2,963> 0,367), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_O ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain,

Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja (X2) secara bersama berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang. Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan (Sig) yang muncul adalah sebesar 0,069, yang berarti sig F (0,069) < a 0,05, hal ini menggambarkan bahwa terdapat signifikan yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh akuntabilitas angaran berbasis kinerja (X1), transparansi anggaran berbasis kinerja (X2), terhadp Kinerja (Y). Berdasarkan IV.25 hasil uji hipotesis tabel Model Summary diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,180 atau 18%, hasil ini berarti 18% variabel akuntabilitas anggaran berbasis kinerja (X1), Transparansi anggaran berbasis kinerja (X2), sedangkan sisanya 82% (100%-18%), dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam metode ini.

Hal ini didukung oleh banyakanya jawaban responden yang menyatakan setuju pada pertanyaan pertama akuntabilitas digunakan dalam meyusun anggaran untuk mencapai sasaran kinerja, dengan demikian badan pemerintah dapat bertindak lebih baik dalam penggunaan dana masyarakat. Selain itu sebagian responden juga menjawab setuju pada pertanyaan ke 12 pengumuman anggaran kepada masyarkat dapat

meningkatkan transparansi hal ini dapat menunjukan kinerja para pegawai pemerintah.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang baik akan meningkatkan kinerja di Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal akan dapat mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja yang baik pula. Pemerintah akan mampu memberikan informasi yang baik kepada msyarakat. Jadi jika prinsip-prinsip good governance terus ditingkatkan maka kinerja di Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang akan semakin baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Sastra Wiguna, dkk (2015) dimana Pengaruh Pengawassan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kubupaten Bulelang Sebesar 88,0%

2) Uji Hipotesis secara parsial (uji t)

Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja secara parsial dilakukan uji hipotesis secara parsial (uji t).

Tabel IV. 29

Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20615,065	7534,677		2,736	,011
Akuntabilitas	,430	,197	,382	2,183	,038
Transparansi	,146	,167	,153	,873	,390

a. Dependent Variable: Kinerja

a) Pengaruh Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja (X1) secara parsial terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang (Y).

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai t $_{hitung}$ untuk variabel akuntabilitas (X1) sebesar 2,183 sedangkan nili t $_{tabel}$ dengan taraf nyata (a) sebesar 0,05 (5%) serta df= n=k-l = (30-4-1)= 25 adalah sebesar 2,060. hasil uji hipotesis individual untuk variabel Akuntabilitas anggaran berbasis kineja (X1) menunjukan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y). hal ini digambarkan dengan ditolaknya H_o dan diterimanya Ha serta signifikan X1 lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,038, jadi dapat disimpulkan akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa nilai t hitung >t tabel (2,183>2,060) dan nilai t sig < 0,05 (0,038) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa Akuntabilitias Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja

Hal ini didukung oleh banyaknya jawaban responden yang menyatakan setuju hal ini terlihat dalam indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Sebagian besar responden menjawab sangat setuju pada pertanyaan kedua tentang penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, dengan demikian badan pemerintah dapat lebih ekonomis dalam menggunakan dana.

Dalam Indikator Akuntabilitas Proses, sebagian besar responden menyatakan setuju hal ini dapat dilihat pada pertanyaan keempat bahwa pengalokasian dana anggaran mengikuti proses -proses dan prosedur yang berlaku, dengan demikian badan pemerintah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Indikator Akuntabilitas Program, sebagian besar responden menyatakan setuju hal ini dapat dilihat pada pertanyaan ketujuh program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dinas menjadi lebih baik.

Pemerintah yang *accountabel* mampu menyajikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional. Penerepan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal akan dapat mewujudkan suatu sistem kepemerintahan yang baik.

Hal ini dapat diperjelas karena keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwaa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuiti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormatii oleh para pegawai sipil dan otoritas publik.

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucy Auditya, dkk (2013) dimana akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

b) Pengaruh Transparansi Anggaran berbasis Kinerja (X2) terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel transparansi (X2) sebesar 0,873 sedangkan nili t_{tabel} dengan taraf nyata (a) sebesar 0,05 (5%) serta df= n=k-1 = (30-4-1)= 25 adalah sebesar 2,060. hasil uji hipotesis individual untuk variabel Transparansi anggaran berbasis kineja

(X2) menunjukan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y). hal ini digambarkan dengan ditolaknya Hadan diterimanya Ho serta signifikan X1 lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,390, jadi dapat disimpulkan transparansi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja.

Hal ini dapat terjadi karena masih adanaya responden dalam indikator Informatif yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran. Sehingga tidak ditemukan pengaruh antara variabel bebas (X2) dengan Variabel terikat (Y).

Dalam Indikator Keterbukaan hasil ini dapat diperjelas dai alasan responden mengenai musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi, yang menyatakan bahwa tidak setuju musrembang dapat meningkatkan transparansi karena musrembang tidak berpengaruh dalam meningkatka transparansi.

Dalam Indikator Pengungkapan hasil ini dapat diperjelas dari masih banyaknya responden yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju mengenai transparansi angggaran dapat mengakomodasi ususlan atau suara rakyat, karena menurut responden tidak adanya pengaruh transparansi anggaran dalam ususlan atau suara rakyat.

Hal ini dapat diperjelas melalui transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketaui dan diawasi oleh DPR dan Masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdiansyah Ardiwirya (2015) dimana transparansi tidak berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasaan dan uraian bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran berbasis Kinerja terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang diketahui bahwa :

1. Akuntabilitas anggaran berbasisi kinerja, Transparansi anggaran berbasisi kineja, secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.
2. Akuntabilitas Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, Transparansi Angggaran Berbasis Kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan kepada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang, diantaranya:

1. Sebaiknya Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang harus meningkatkan prinsip-prinsip good governance secara optimal dalam melaksanakan kinerja.
2. Sebaiknya Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang harus melibatkan ususlan atau suara rakyat dalam memberikan pendapat.

3. Sebaiknya Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang harus mempertahankan prinsip-prinsip good governance yang telah diterapkan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Adiwirya, Firdiansyah,dkk. (2015). *AkuntabilitasTransparansidanAnggaran BerbasisKinerjaPerangkatDaerahKota Denpasar*. JurnalAkuntansi, (online), Vol 1, No 2, http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11371, di akses 22Mei 2016

Auditya, lucydkk. (2013). *AnalisisPengaruhAkuntabilitasdanTransparansi PengelolaanKeuangan Daerah TerhadapKinerjaPemerintah Daerah*.JurnalAkuntansi, (online), Vol 3, No 1, http://repository.unib.ac.id/6940/1/Artikel1.pdf, di akses 22 Mei 2016

Bastian, Indra. (2010). *AkuntansiSektorPublik*: PenerbitErlangga

Budi, Made S.W, dkk. (2015). *PengaruhPengawasaanKeuangan Daerah, AkuntabilitasdanTransparansiPengelolaanKeuangan Daerah TerhadapKinerjaPemerintah Daerah KabupatenBulelang*.JurnalAkuntansi, (online), Vol 3, No 1, http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5239, diakses 22 Mei 2016

Mahmudi.(2007). *ManajemenKinerjaSektorPublik*.Edisike 2. UPP STIM YKPN: Yogyakarta

Mardiasmo. (2009). *AkuntansiSektorPublik*, Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset

Sugiyono.(2009a). *MetodePenelitianBisnis*.Bandung: Penerbit CV. Alfabeta

Sugiyono.(2009b). *StatistikaUntukPenelitian*.Bandung: Penerbit CV. Alfabeta

SantosoSinggih (2014). SPSS 22 from Essential to Expert Skills, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Kepada Yth,

Bapak/ibu/Saudara/i

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang

Di tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan untuk memenuhi kelengkapan penyususnan skripsi, saya bermaksud mengadakan penelitian pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang dengan judul " Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang", salah satu syarat untuk mengikuti ujian sarjana pada Universitas Muhammadiyah Palembang. Maka dengan kerendahan hati penulis, memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk sedikit meluangkan waktu dalam mengisis kuesioner yang telah dilampirkan.

Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah dan hanya dipergunakan untuk keperluan penyususnan skripsi, disamping itu juga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan mesukan bagi penulis.

Saya mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk menjawab semua pertanyaan yang ada secara jujur dan terbuka, mengingat data yang saya perlukan sangat besar sekali artinya.

Atas segala bantuan dan partisipasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Lailatul Qodariah

KUESIONER

" PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA DINAS KEBERSIHAN KEINDAHAN KOTA PALEMBANG"

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Umur :
4. Tingkat Pendidikan : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
5. Jabatan :
6. Masa Kerja : ☐ < 5tahun ☐ 5-10 tahun ☐ > 10 tahun

Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberi tanda check list ( ) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan keadaaan di tempat Bapak/Ibu bekerja.

Pilihan Jawaban : SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Palembang,

( )

- Nama dan Tandatangan
- Cap DKK Kota Palembang

Kuesioner Akuntabilitas

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum						
1	Akuntabilitas kejujuran di gunakan dalam menyusun anggaran untuk mencapai sasaran kinerja					
2	Penggunaan dana anggaran di dasarkan atas hukum dan peraturanyang berlaku					
3	Anggaran yang di rancang sesuai dengan aturan yang di landaskan hukum guna memberikan hasil kinerja yang baik					
Akuntabilitas Proses						
4	Pengalokasian dana anggaran meliputi proses-proses dan prosedur yang berlaku					
5	Proses dan pertanggungjawaban anggaran di awasi secara terus menerus					
6	Prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi					
Akuntabilitas Program						
7	Program-program anggaran di rancang dengan mempertimbangkan prinsip efesiensi untun menghasilkan kinerja yang maksimal					
8	Program-program anggaran di rancang dengan memepertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau kepentingan publik					
9	Pelaksanaan program-program penyususnan anggaran benar-benar di rasakan manfaatnya untuk meningkatkan kinerja					
Akuntabilitas Kebijakan						
10	Kebijakan atau aturan yang di buat oleh pemerintah berguana dalammengevaluasi kinerja					
11	Restrada dan arah kebijakan umum anggaran meruapakn dasar dalam pegelolaan anggaran					

Kuesioner Transparansi

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
Informatif						
1	Pegumuman anggaran kepada msyarakat dapat meningkat kan transparansi					
2	Informasi yang di berikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran					
3	Mudah untuk mengakses dokumenpublik tentang anggaran					
Keterbukaan						
4	Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis					
5	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
6	Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu					
Pengungkapan						
7	Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan atau suara rakyat					
8	Pengumumuman tentang anggaran bisa di dapat setiap waktu					
9	Pengumuman kebijakan anggaran mudah di dapatkan oleh publik					

Kuesioner Kinerja

NO	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
Masukan						
1	Kinerja diukur berdasarkan tingkat dan besaran sumber dana yang didapat					
2	Kinerja diukur berdasarkan produk (barang dan jasa) dari program atau kegiatan					
Keluaran						
3	Kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan					
4	Anggaran selalu digunakan secara efisien dan hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan					
5	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif					
Hasil						
6	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan					
7	Anggaran dikelola secara efisien dengan pengggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu					
8	Anggaran dikelola secara adil*(equity)* dan merata (*equality*) dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas					
Manfaat						
9	Anggaran dikelola secara merata dan penggunaan dana publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu					
10	Adanya peranan pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingandaerah					
Dampak						
11	Penerapan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran					
12	Pemerintah mencapai Good Governance yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, ekonomis, efisien serta efektif					
13	Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik					

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/I / 2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015	(B)

.umpalembang.ac.id Email : febumplg@umpalembang.ac.id

ımat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Maret 2017

Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB

Nama :Lailatul Qodariah

Nim : 222012246

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Welly, S.E, M.Si	Pembimbing	20-3-2017	
Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak, CA	Ketua Penguji	17-3-2017	
Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Penguji I	17-3-2017	
Welly, S.E, M.Si	Penguji II	15-3-2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG
Jalan Sukarela No. 129 A Km. 7 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 415130 Faksimile : (0711) 415305 Kode Pos 30152
E-mail : dkk_plg@gmail.com , Website : www.dkk.palembang.go.id

Palembang, 8 April 2016

r : 070/650 /DKK/2016
: Biasa
ran : -
l : Izin Penelitian / Pengambilan Data

Kepada.
Yth. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang
di -
Palembang

Menanggapi Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Nomor : 070/1199/BAN.KBP/2016 tanggal 30 Maret 2016 Perihal permohonan izin pengambilan data / Penelitian an. Lailatul Qodariah NIM : 222012246 Judul "Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja".

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan memberikan izin Penelitian / Pengambilan Data dimaksud, sepanjang bahan dan keterangan yang didapat benar – benar digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan saja.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KEBERSIHAN
SEKRETARIS DINAS,

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KEBERSIHAN KOTA

Drs. H. MAHBUK
Penata Tk. I
NIP. 195908101986091001

san :
n Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
asiswa Ybs.
p

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA	: **Lailatul Qodariah**	PEMBIMBING	
M	: **22 2012 246**	KETUA	:**Welly, S.E., Msi**
OGRAM STUDI	: **Akuntansi Sektor Publik**	ANGGOTA	:
DUL SKRIPSI	: **PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA PALEMBANG**		

).	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	2/8/2016	Bab I s/d III			Perbaiki
2					
3	4/8/2016	Bab I s/d III			Acc lanjut
4					
5	8/12/2016	Bab IV s/d III			Perbaiki
6					
7	6/1/2017	Bab IV s/d V			Analisis Ditambah
8					Alasan
9	18/1/2017	Bab IV s/d V			Perbaiki lagi
10					Dianalisis
11	2/2/2017	Bab IV s/d V			Perbaiki
12					
13	9/2/2017	Bab IV s/d V			Acc ujian
14					kompreh.
15					
16					

ATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : 9 / 2 / 2017

a.n. Dekan

Program Studi

Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: LAILATUL QODARIAH
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222012246
Fakultas	: EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir	: PALEMBANG, 09-03-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Mariana Ilir
Kecamatan	: Banyuasin I
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 30 September 2015

Mengetahui
Rektor

Dr. Hj. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Lailatul Qodariah
Place/Date of Birth	:	Palembang, March 9th 1994
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	February, 4th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension	:	46
Structure Grammar	:	39
Reading Comprehension	:	42
OVERALL SCORE	:	423

Palembang, February, 11th 2016
Head of Language Institute

LEMBAGA BAHASA
Univ. Muhammadiyah Palembang

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 092/TEA FE/LB/UMP/II/2016

122 certificates

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**LAILATUL QODARIAH**
NIM	:	**222012246**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Rabu, 20 Juli, 2016
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Dr. Firmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902

BIODATA PENULIS

Nama	: Lailatul Qodariah
NIM	:222012246
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	: Akuntansi
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 09 Maret 1994
Alamat	:Jl. Sukabangun II No. 1530 Rt 26 Rw 04 kel. Sukabangun Kec. Sukarami
No HP	: 081532419074
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: Muhammad Ali. Spd,I
2. Ibu	: Musringah
Pekerjaan Orang Tua	:
1. Ayah	: Pensiunan PNS Guru
2. Ibu	: Wiraswasta
Alamat Orang Tua	: Jl. Sukabangun II No. 1530 Rt 26 Rw 04 kel. Sukabangun Kec. Sukarami

Palembang,

Penulis

Lailatul Qodariah